

BAB II

TELAAH PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Konsep Kemiskinan

Konsep masyarakat mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar tingkat pendapatan atau konsumsi yang rendah. Kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, seperti sandang, papan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut Friedman (1979) menjelaskan kemiskinan ketidakmampuan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Kondisi masyarakat yang disebut miskin berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Standar hidup di masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Menurut Mubyarto (1998) menjelaskan kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Menurut Sen (1992), menjelaskan kemiskinan dapat terjadi akibat perampasan kapabilitas (*capability deprivation*), yakni kebebasan untuk mencapai sesuatu

dalam hidup seseorang. *Millennium Development Goals (MDGs)* menyetujui delapan butir komitmen untuk mencapai tujuan nyata memberantas kemiskinan dan pembangunan yang lebih manusiawi, yaitu: mengentaskan kemiskinan dan kelaparan absolut, mencapai pendidikan dasar universal, mendukung persamaan gender dan pemberdayaan wanita, mengurangi tingkat mortalitas anak, memperbaiki kesehatan ibu hamil, memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, menjaga kelangsungan lingkungan dan mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Sustainable Development Goals (tujuan pembangunan berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti *MDGs*. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan berkelanjutan dimana di dalamnya terdapat 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) adalah kesepakatan pembangunan baru pengganti *MDGs*. *SDGs* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Menurut Balisacan *et al.* (2003) menjelaskan pertama, peningkatan modal manusia akan mengurangi kemiskinan. Investasi dalam bidang pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan dan secara otomatis akan mengurangi kemiskinan. Kedua, perkembangan teknologi akan meningkatkan pertambahan pendapatan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Ketiga, sektor keuangan tidak mempunyai dampak terhadap kemiskinan.

Menurut Chambers (1997) menjelaskan 12 dimensi yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Kedua belas dimensi tersebut, terdiri dari: (1) pendidikan/kemampuan, (2) institusi dan akses, (3) waktu, (4) musim, (5) tempat tinggal/lokasi, (6) keamanan, (7) ketidakmampuan fisik, (8) material, (9) hubungan sosial, (10) hukum, (11) kekuasaan politik, (12) informasi. Menurut Christian *et al.* (2007) menjelaskan kemiskinan merupakan kurangnya kesejahteraan. BPS (2008) kemiskinan adalah suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

World Bank (2004) menjelaskan kemiskinan dalam standar ukur kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal kekurangan dengan pendapatan minimum US\$ 1 per hari (Albornoz *et al.*, 2007). World Bank dan UNDP (*United Nations Development Programme*) menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subyektif (Locatelli *et al.*, 2009; World bank, 2008). Kemiskinan merupakan kurangnya kebutuhan 80 % untuk memenuhi kesejahteraan, sisanya 10-20% adalah garis kemiskinan absolut (Jain & Khanna, 2009). World Bank (2010) menjelaskan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan. Hal ini

termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat.

Definisi yang luas dari kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan di mana ada saling tukar dalam konsep ini (Case & Fair, 2010). Menurut Bappenas (2012), kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kesimpulan dari beberapa konsep kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mengaju pada definisi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu keluarga prasejahtera.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa *literature review* dijelaskan (lampiran) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan penelitian yaitu:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	Riyanto Efendi; Setyabudi Indartono; Sukidjo, (2019), Indonesia	The Relationship of Indonesia's Poverty Rate Based on Economic Growth, Health, and Education	Variabel terikat: pertumbuhan ekonomi Variabel bebas: Kesehatan dan pendidikan Periode Pengamatan: 2004- 2017 Metode: Regresi	Variabel terikat: kemiskinan Variabel bebas: geografi Model: Data Panel Periode Pengamatan: 2003-2018
2	Jodie Somerville,(2018) , New Zealand	Relationship between Poverty and Educational	Variabel kemiskinan dan pendidikan	Variabel terikat: kemiskinan Variabel bebas: geografi dan kesehatan

...Lanjutan Tabel 2.1

		Outcomes		
3	Kwok Chin Hoe, Haris Abd Wahab, Siti Hajar Abu Bakar, M Rezaul Islam,(2018) Malaysia	Community participation for rural poverty alleviation: A case of the Iban community in Malaysia	Metode: Deskriptif Variabel terikat: Kemiskinan Variabel bebas: Umur, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan,keanggotaan organisasi	Metode: Data Panel Variabel bebas: geografi pendidikan dan kesehatan
4	Alessandra Cepparulo, Juan Carlos Cuestas and Maurizio Intartaglia, (2017)	Financial development institutions and poverty alleviation: an empirical analysis	Metode; Analisis Chi square Variabel terikat : kemiskinan Variabel bebas: kelembagaan	Metode: Data Panel Variabel bebas: Geografi, pendidikan dan kesehatan
5	Alhaji Bukar Mustapha Rusmawati Said Shaufique Fahmi Sidique, (2015) Nigeria	Urban poverty, inequality and industry in Nigeria	Variabel terikat: kemiskinan Variabel bebas: Pertumbuhan sektor industri Metode: Data panel	Variabel bebas: geografi, Pendidikan dan kesehatan
6	Julius Maiyo, (2015), Kenya	Education and poverty correlates: A case of Trans- Nzoia County, Keny	Variabel: kemiskinan, putus sekolah, tingkat kelompok, prestasi akademik Metode: Correlation Pearson's product momen	Variabel:geografi dan kesehatan Metode: Data Panel
7	Carlos Gradin (2015), Cina	Rural Poverty and Ethnicity in China	Variabel:Geografi, jumlah anak-anak, pendidikan kepala rumah tangga Metode: Regresi	Variabel: kesehatan: Metode:Data panel
8	Gindo Tampubolo Wulung Hanandita, (2014) Indonesia	Poverty and mental health in Indonesia	Variabel: Kemiskinan dan kesehatan Metode: Analisis bivariate	Variabel: pendidikan Metode: Data panel
9	Suzanne Porter and Mark Edwards, (2014) Oregon	Household and Economic Factors Associated with Geographic and School	Variabel; Jenis kelamin, umur, pendidikan, karakteristik rumah tangga Metode: Regresi binary logistik	Variabel: geografi dan kesehatan Metode: Data panel

...Lanjutan Tabel 2.1

		Mobility among Low Income Children		
10	Muhammad Afzal, Muhammad Ehsan Malik, Ishrat Begum, Kafeel Sarwar, Hina Fatima, (2012), Pakistan	Relationship among Education, Poverty and Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis	Variabel: pendidikan, kemiskinan, modal fisik dan pertumbuhan ekonomi Metode: Time series	Variabel: geografi dan kesehatan Metode: Data panel
				Berlanjut ke hal 25...
11	Siti Hadijah Che Mata, Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Mukaramah Harun, (2012), Malaysia	Does Non-Farm Income Improve The Poverty and Income Inequality Among Agricultural Household In Rural Kedah	Variabel: Pendapatan rumah tangga pertanian, pendapatan non-pertanian Metode: Indeks FGT	Variabel: kesehatan Metode: data panel
12	Kenneth R. Simler and Virgulino Nhate, (2008), Mozambique	Poverty, Inequality, and Geographic Targeting: Evidence from Small-Area Estimates in Mozambique	Variabel: Usia dan jenis kelamin komposisi rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, tingkat pendidikan, karakteristik pekerjaan, karakteristik tempat tinggal, dan kepemilikan pertanian Metode: Regresi	Variabel: pendidikan dan kesehatan

2.3 Konsep Orang Miskin

Menurut Sajogyo (2005) Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah

dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian). Menurut Mueller (2006), orang miskin adalah mereka yang tetap atau sementara dalam keadaan lemah, tergantung dan remeh, dalam keadaan kekurangan yang berbeda-beda menurut zaman dan pola masyarakat serta dalam keadaan tak berdaya dan terhina. Masyarakat yang menghabiskan lebih dari 70 persen pengeluarannya hanya untuk makanan disebut sebagai kategori orang miskin (Bappenas, 2012). Orang miskin tidak memiliki uang, koneksi, pengaruh, kuasa, pengetahuan, keterampilan teknis, kelahiran yang terhormat, kekuatan fisik, kemampuan intelektual, kebebasan pribadi bahkan harkat manusia.

2.4 Konsep Keluarga Miskin

Asnawi (1994) menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh 3 faktor yaitu: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor teknologi. Menurut Ritonga (2003) menjelaskan kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Dalam menentukan rumah tangga miskin, BPS menggunakan 14 variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin. Keempat belas variabel tersebut adalah:

commit to user

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 kriteria terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.



2.5 Kriteria Pengukuran Kemiskinan Menurut BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Sistem pendataan ini dilakukan secara konsisten dengan pelaporan bulanan dari pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) kepada BKKBN Pusat tentang data jumlah pengguna kontrasepsi. Tahun 1985 BKKBN mengembangkan sistem pendataannya dan melakukan survei perencanaan keluarga nasional. Pada tahun 1994 terjadi perubahan ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga. Kesejahteraan keluarga digunakan untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera 1 (KS1), keluarga sejahtera 2 (KS2), keluarga sejahtera 3 (KS3), dan keluarga sejahtera 3 plus (KS3 Plus).

Terdapat 23 indikator penentuan kesejahteraan keluarga oleh BKKBN antara lain:

1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya;
2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari;
3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian;
4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah;
5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan;
6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur;
7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu;

8. Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun;
9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni;
10. Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir;
11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap;
12. Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis;
13. Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah;
14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi;
15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya;
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung;
17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi;
18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat;
19. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan;
20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah;
21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal;
22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan
23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal.

Tabel 2.2 Perbandingan Aspek Kemiskinan Menurut BPS dan BKKBN

Aspek	Data BPS	Data BKKBN
Metode	Survey → Susenas	Sensus
Cakupan wilayah	Hanya bisa dibreakdown s.d kabupaten/kota	Tersedia sampai desa
Manajemen data	Terorganisasi secara baik di tingkat pusat	Kurang terorganisasi
Waktu	Dilakukan secara periodik 3 tahun sekali	Dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali
Unit observasi	Rumah tangga	Keluarga
Pendekatan	<i>Basic needs</i> → ekonomis	Mencakup non ekonomis
Penghitungan	Secara kuantitatif. Dilakukan secara obyektif dengan menggunakan nilai moneter atas sejumlah komoditas yang ditentukan.	Secara kualitatif. Penghitungannya bersifat kategorik atas sejumlah indikator yang bersifat 'subyektif' dan tidak dilakukan kuantifikasi secara moneter atas sejumlah indikator yang ditentukan
Komoditas yang diukur	Komoditas makanan dan non makanan dalam suatu bundel	Tidak disebutkan secara spesifik
Indikator	Lebih obyektif	Lebih subyektif
Kegunaan	Baik untuk perencanaan dan analisis	Baik untuk pelaksanaan di lapangan

Sumber: Sakit, Pemiskinan, dan MDGS (Thabrani, 2009)

Dari sisi konsep, pengukuran, pendekatan, penetapan indikator, penghitungan dan pengorganisasian data tampak data penduduk miskin yang dikumpulkan oleh BPS lebih baik dibanding dengan data penduduk (keluarga) miskin yang dikumpulkan oleh BKKBN. Kelebihan dari data BKKBN adalah karena data tersebut dapat tersedia secara rinci sampai ke tingkat desa sehingga memudahkan bagi para pelaksana program untuk menggunakannya. Data dari BPS karena hanya diambil dari sejumlah sampel maka tidak tersedia secara rinci sampai ke tingkat desa.

2.6 Indikator-indikator Kemiskinan

Indikator nasional dalam menentukan jumlah penduduk yang dikategorikan miskin ditentukan oleh standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum. Kemiskinan menjelaskan ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2005).

Menurut Jhingan (2000), menjelaskan tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan akibat yang terkait kemiskinan. pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

2.7 Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro (1994) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan faktor, yaitu:

1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan.
2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan.
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
4. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara.

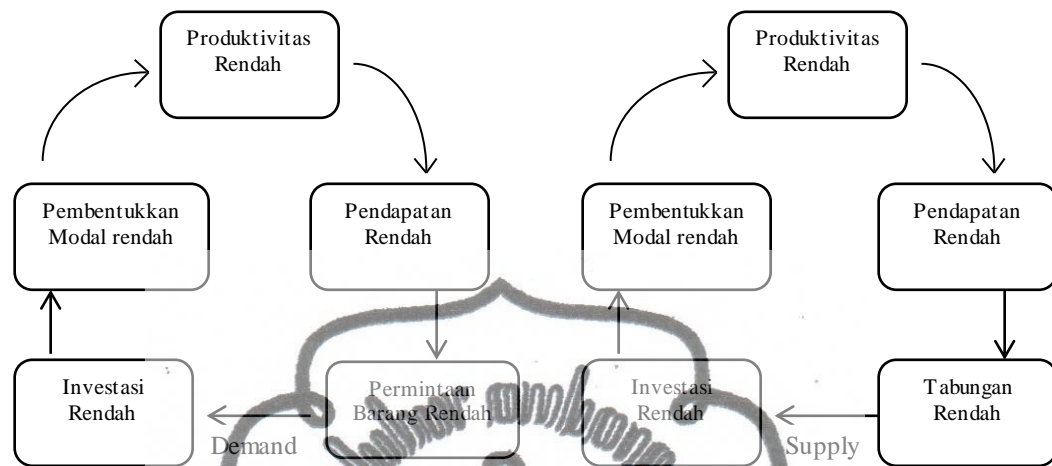
5. Perbedaan struktur industri.
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain.

Sharp *et al.* (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas yang rendah, pada akhirnya berimplikasi pada upah yang rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan keturunan.
3. Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Kuncoro, 2004).

Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):



Sumber: (Jhingan, 2010)

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle Nurkse*)

Lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal.

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan

dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda di setiap negara. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan dampak pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

2.8 Jenis-jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling

commit to user

banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini terkadang memiliki unsur diskriminatif.

2.9 Teori Kemiskinan

Teori yang dikemukakan oleh Acemoglu & Robinson (2012). Tokoh ini mengajukan suatu teori yang disebut teori *Institusi Politik Ekonomi*. Institusi politik ke arah kemakmuran disebut sebagai institusi yang *inklusif*, sedangkan institusi ke arah kemiskinan disebut institusi yang ciri-ciri yang menonjol dari institusi yang inklusif adanya jaminan negara terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Adanya kebebasan, masing-masing individu di dalam masyarakat memiliki insentif untuk bekerja dan memproduksi menciptakan kemakmuran. Sebaliknya, di negara yang ekstraktif, masyarakat justru mendapatkan disinsentif untuk bekerja dan memproduksi. Di dalam masyarakat semacam itu, tidak ada jaminan bahwa suatu hari hasil jerih payah masyarakat akan dirampas semena-mena oleh pemerintah dan kelompok elit.

Teori ini membantah pendapat yang menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi akibat kondisi geografis, budaya, dan ketidaktahuan. Kelompok kaya dan miskin, antara negara gagal dan negara berhasil.

Hipotesis yang dikemukakan oleh Acemoglu & Robinson sebagai berikut:

1. Hipotesis Geografis

Menurut Acemoglu & Robinson (2012) menyatakan bahwa penyebab mengapa suatu negara lebih miskin daripada negara lainnya adalah karena adanya perbedaan kondisi geografis. Para pendukung hipotesa ini menyatakan bahwa negara-negara miskin di dunia, seperti negara-negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan, menjadi miskin karena kondisi geografi, iklim, dan cuaca di negara-negara tersebut tidak kondusif bagi penciptaan kemakmuran.

Negara miskin di kawasan Afrika, Amerika Tengah, dan Asia Tengah yang secara geografis terletak di sekitar Utara dan Selatan, sementara negara-negara kaya terletak di daerah beriklim sedang.

Montesquieu menjelaskan masyarakat yang hidup di iklim tropis cenderung pemalas dan tidak menggunakan otaknya untuk belajar. Akibatnya mereka enggan bekerja keras dan berinovasi, dan penyebab mereka miskin. Namun hipotesis geografis ini gagal menjelaskan timbulnya perbedaan antara Korea Utara dengan Selatan atau antara Jerman Barat dengan Timur. Sejarah menunjukkan bahwa korelasi sederhana antara iklim atau letak geografis dengan kemakmuran tidak bisa dijadikan landasan teori yang solid. Hipotesis geografis bukan saja gagal menjelaskan penyebab timbulnya kesenjangan di berbagai belahan dunia, namun juga tak mampu mengungkap musabab mengapa banyak negeri seperti Jepang dan China bisa begitu lama “tertidur” sebelum akhirnya bangkit dan mencapai tingkat pertumbuhan yang fenomenal.

2. Hipotesis Kebudayaan

Menurut Acemoglu & Robinson (2012) berpendapat teori hipotesis kebudayaan yang cukup luas pengaruhnya mengaitkan kemakmuran dengan kebudayaan. Hipotesis geografis, hipotesis kebudayaan dikembangkan oleh sosiolog terkenal asal Jerman, Max Weber. Hipotesis kebudayaan tidak lagi tertumpu pada landasan agama, melainkan pada keyakinan, tata nilai, dan etika. Orang beranggapan bahwa Afrika miskin karena tidak memiliki etos kerja yang baik, masih percaya pada tenung dan sihir, menolak teknologi baru dari Barat.

Hipotesis kebudayaan juga gagal menjelaskan aspek-aspek lain dari distribusi kemakmuran negara. Hipotesis ini juga tidak dapat menjelaskan fenomena kesenjangan antar wilayah di dunia. Nogales dan Sonora yang memiliki kebudayaan hampir sama dan berjarak hanya beberapa meter saja namun mengalami gap ketimpangan yang jauh. Hipotesis kebudayaan sangat lemah untuk menjelaskan fenomena.

3. Hipotesis Ketidaktahuan

Menurut Acemoglu & Robinson (2012) berpendapat bahwa hipotesis ketidaktahuan yang menyatakan bahwa kesenjangan yang terjadi karena para penguasa tidak tahu cara memakmurkan bangsanya yang melarat. Ide ini dikembangkan oleh Lionel Robbins pada tahun 1935 yaitu ekonomi adalah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia sebagai hubungan antara upaya pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya yang langka. Hipotesis ketidaktahuan menjelaskan bahwa negara-negara miskin adalah korban kondisi gagal pasar karena para ekonom dan para pembuat kebijakan yang salah di masa lalu, sebaliknya negara-negara kaya bisa seperti itu sebab para pemimpinnya bekerja keras membuat kebijakan yang lebih efektif dan berhasil mengatasi kondisi gagal pasar. Teori tersebut tidak dapat menjelaskan asal mula timbulnya kemakmuran di berbagai negara maupun peta distribusi kemakmuran.

4. Hipotesis kelembagaan/institusi

Acemoglu & Robinson (2012) berpendapat penyebab kesenjangan institusi politik di masing-masing negara, karena institusi politik yang akan menentukan institusi ekonomi suatu negara, selanjutnya mempengaruhi kemajuan perekonomiannya. Institusi ekonomi inklusif akan mendorong kreativitas dan kemajuan ekonomi suatu bangsa, sebaliknya, institusi ekonomi ekstraktif akan memiskinkan (Acemoglu & Robinson, 2012). Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memiliki institusi ekonomi ekstraktif, sehingga sulit mencapai kemakmuran.

Tabel 2.3 Faktor-faktor Teori Kemiskinan

Hipotesis	Tokoh	Pemikiran	Fakta
Geografi (<i>Geography Hypothesis</i>)	Montesquieu, Jared Diamond dan Jeffry Sach	Bahwa suatu wilayah/daerah lebih maju karena didukung oleh kondisi geografi. Contohnya Sumber Daya Alam (SDA)	Teori ini tidak mampu menjelaskan persoalan pokok tersebut
Kebudayaan (<i>Culture Hypothesis</i>)	Max Weber	Bahwa suatu wilayah/daerah lebih maju karena faktor budaya dan nilai sosial. Contoh gotong-royong	Teori ini tidak mampu menjelaskan persoalan pokok di atas.
Kebodohan/Ke tidaktauan (<i>Iqnorance Hypothesis</i>)	Lionel Robbins	Bahwa pembangunan di suatu wilayah/daerah kurang maju karena ketidaktahuan	Teori ini tidak mampu menjelaskan persoalan pokok
	Daron Acemaglo & James Robinson	Perekonomian suatu negara akan maju jika menerapkan ekonomi inklusif, sebaliknya, negara akan menjadi miskin jika menerapkan ekonomi ekstraktif.	Teori ini di pandang lebih mampu menjelaskan persoalan pokok

Sumber: “*Why Nation Fail*”, Daron Acemoglu & James Robinson, 2012

2.10 Kemiskinan Ditinjau Dari Berbagai Faktor

a. Kemiskinan ditinjau dari geografi

Suharyono (1994) menjelaskan konsep esensial geografi, yaitu: lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi areal, interaksi/interdependensi, dan nilai guna. Namun, konsep geografi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep lokasi

Konsep lokasi merupakan konsep utama geografi yang menjadi ciri khusus dalam keilmuan geografi. Secara umum lokasi dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau kisi-kisi koordinat. Lokasi absolut disebut juga dengan letak astronomis. Lokasi relatif adalah lokasi suatu obyek yang nilainya ditentukan berdasarkan obyek atau obyek lain di luarnya. Lokasi relatif disebut juga letak geografis.

2. Konsep Jarak

Jarak sebagai konsep geografi mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi maupun juga untuk kepentingan pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Jarak berkaitan erat dengan arti lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan atau keperluan pokok kehidupan pengangkutan barang dan penumpang.

3. Konsep Keterjangkauan

Keterjangkauan lebih berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau transportasi yang dipakai. Keterjangkauan umumnya berubah dengan adanya perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, dan bagi daerah dengan keterjangkauan sangat rendah akan sangat sulit mencapai kemajuan dan perkembangan perekonomian.

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan ke lingkungan dalam konteks keruangan. Bintarto & Sumarno (1978) menjelaskan pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa keruangan dan analisis ekologi merupakan analisa kompleks wilayah. Wilayah-wilayah tertentu didekati dengan pengertian *areal differentiation* yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang. Ilmu wilayah menerangkan bahwa suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena itu terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pola abstrak ini berkaitan gejala konkrit geografi, maka disebut konsep geografi.

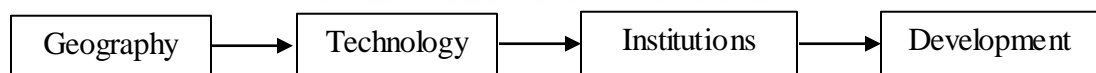
Menurut Daldjoeni (1998) terdapat delapan faktor geografis yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu: relasi ruang (lokasi, posisi, bentuk, luas, jarak); relief atau topografi (tinggi rendahnya di permukaan bumi), jenis tanah; flora dan fauna; air tanah dan kondisi pembuangan air; sumber-sumber mineral (barang tambang); dan relasi dengan lautan.

Suatu kondisi kurang menguntungkan karena faktor geografis yang ada pada dan di sekitar objek bersangkutan. Faktor ini berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan dalam segi posisi, jarak, dan aksesibilitas. Faktor utama penyebab kemiskinan dilihat dari sudut pandang geografi adalah letak geografis masyarakat dan wilayah. Masalah kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang geografi dengan mengadakan program pemberdayaan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang ada di tempat tinggalnya sehingga dengan mengelola sumber daya alam yang baik dan dapat memanfaatkan potensi alam untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kehidupan.

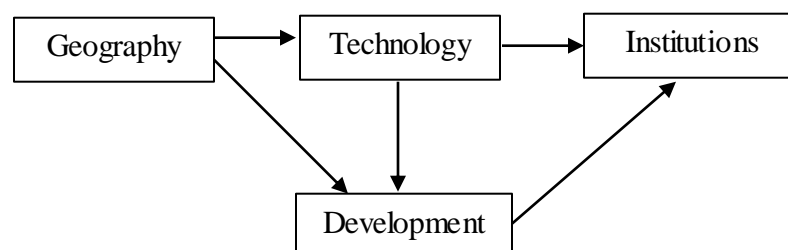
a) Pola I



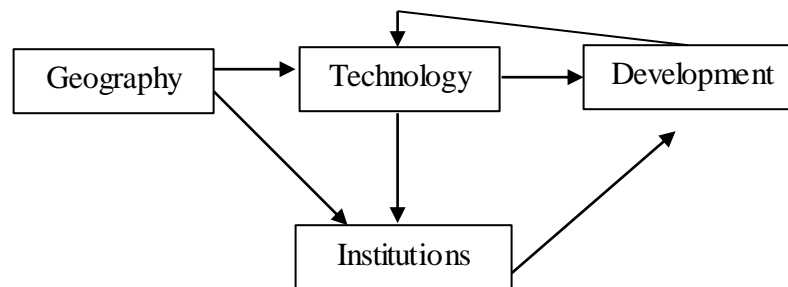
b) Pola II



c) Pola III



d) Pola IV



Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan persoalan geografis (Sachs, 2005; Suharyono, 1994). Menurut McArthur & Sachs (2001) terdapat beberapa empat pola transmisi pendekatan geografis dan kelembagaan dalam mempengaruhi pembangunan. Pola I menunjukkan bahwa geografis akan berpengaruh terhadap kelembagaan, sedangkan kelembagaan akan mempengaruhi pembangunan. Pola II bergerak dalam geografis mempengaruhi teknologi, sedangkan teknologi berpengaruh terhadap kelembagaan dan terakhir berdampak terhadap pembangunan. Sementara itu, pola III dan IV jalur pengaruh geografis terhadap pembangunan menjadi lebih rumit. Pola III dibagi menjadi dua jalur. Jalur pertama adalah geografis teknologi pembangunan, sementara jalur kedua, geografis dan teknologi mempengaruhi kelembagaan yang berpengaruh terhadap pembangunan. Pola IV, proses utamanya sama dengan pola III, namun di akhir jalur, pembangunan akan mempengaruhi teknologi dan seterusnya.

Berdasarkan pendekatan geografis ini dapat dibedakan kemiskinan di pedesaan dan di perkotaan. Kemiskinan pedesaan (*rural poverty*): (i) terbatasnya akses ke fasilitas tanah dan irigasi, (ii) lambatnya adaptasi terhadap teknologi modern (iii) terlalu besar beban yang ditanggung, (iv) terbatasnya modal manusia, (v) terkonsentrasi di daerah pinggiran, (iv) terbatasnya modal manusia, (v)

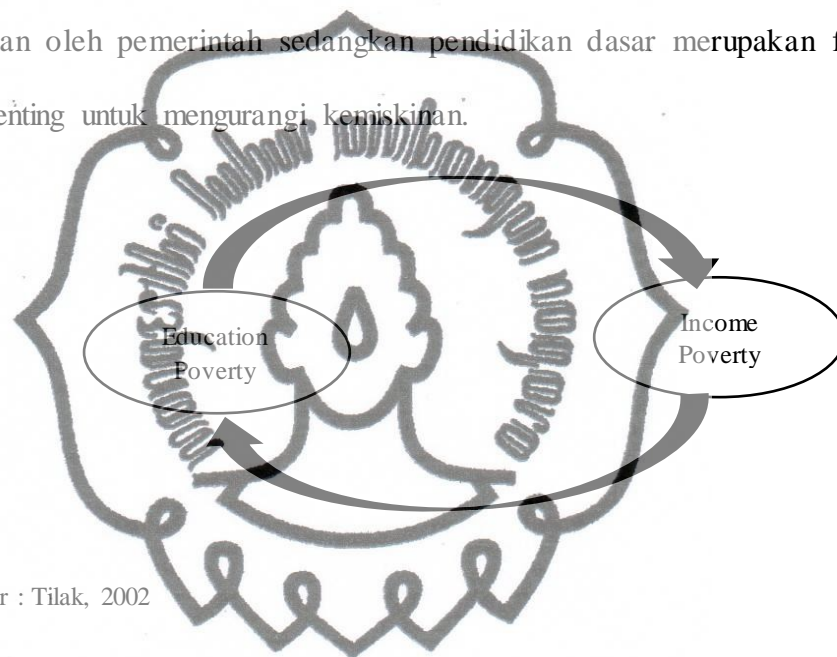
terkonsentrasi di daerah pinggiran, (vi) terkonsentrasi pada minoritas etnis (Pernia & Quibra, 1999). Kemiskinan perkotaan (*Urban Poverty*); (i) mempunyai keterbatasan terhadap akses daya dan pelayanan, (ii) keterbatasan sumber daya manusia yang bermutu, (iii) terlalu besar beban yang ditanggung (iv) rendahnya upah yang didapat (v) banyaknya usaha kecil yang tidak terorganisasi (vi) banyaknya kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kapabilitas (Pernia & Quibra, 1999).

b. Kemiskinan ditinjau dari pendidikan.

Menurut World Bank (2006), rendahnya tingkat pendidikan penduduk miskin akan menyebabkan produktivitas rendah akan membuat keluaran dan pendapatan rendah, sehingga terjadi kemiskinan. Rumah tangga miskin akan kesulitan untuk membiayai anak-anaknya sekolah sehingga akan beralih pada generasi selanjutnya yang berpendidikan rendah dan menimbulkan kemiskinan. Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus memutuskan rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan pendidikan penduduk miskin.

Pendapat Todaro (2002) pendidikan merupakan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Notoatmodjo (2003) menjelaskan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Menurut Tilak (2005) di India menjelaskan ada anggapan di antara pembuat kebijakan bahwa pendidikan menengah dan tinggi tidak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Disisi lain melek huruf dan pendidikan dasar merupakan faktor yang dianggap penting. Di negara India menjelaskan pendidikan menengah merupakan pendidikan tinggi dan diabaikan oleh pemerintah sedangkan pendidikan dasar merupakan faktor yang penting untuk mengurangi kemiskinan.



Sumber : Tilak, 2002

Gambar 2.2 Inter-Hubungan antara Kemiskinan Pendidikan dan Pendapatan Kemiskinan

Kemiskinan pendapatan rumah tangga tidak memungkinkan untuk mencukupi investasi dalam pendidikan. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Mendidik memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Pendidikan secara luas ada hubungan antara kemiskinan dan pendidikan, menurut Berg (1986) membagi menjadi dua arah yaitu penduduk miskin tidak dapat akses pendidikan dan penduduk yang tidak berpendidikan dibatasi hidup yang miskin. Pendidikan dapat mengurangi kemiskinan menurut Janjua & Kamal (2011) menjadi tiga bagian; pertama, pendidikan dapat meningkatkan pendapatan seseorang dan mengurangi kemiskinan. Kedua, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan bukan hanya pendapatan atau produktivitas tetapi berpengaruh secara tidak langsung juga seperti kurangnya kematian bayi, pengembangan kesehatan dan kepala rumah tangga yang berpendidikan. Ketiga, pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan dapat mengubah beragam hal-hal yang terkait dengan keadaan ekonomi, keperluan tenaga kerja dan kualitas pendidikan.

Menurut Junaidi (2012) lebih dari enam puluh persen penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan yang pada umumnya menggantung hidupnya di sektor pertanian. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk yang tinggal di perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik dari pada penduduk di perdesaan. Pendidikan merupakan sarana untuk menghapuskan kebodohan, pendidikan sendiri memiliki beberapa jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi sederajat. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh orang.

Menurut BPS pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Pendidikan dapat diartikan yakni bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya agar mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa tergantung pada orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat beberapa jalur pendidikan di Indonesia menurut UU No. 20 Tahun 2003, yakni:

- a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang memiliki struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Adapun jenjang-jenjang pendidikan formal yakni:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan secara sistem terbuka. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kepemudaan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil dari pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal maupun non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan sebagai investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan dan dapat terlibat dalam proses pembangunan.

Pendidikan yang terprogram dengan baik dan menjangkau semua, dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen yang paling efektif untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang ada di negara berkembang (Sholihah, Yulianti, & Wartono, 2016). Buruknya kualitas pendidikan menunjukkan buruknya kualitas suatu negara begitu juga sebaliknya. Masalah pendidikan mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Pendidikan dasar merupakan tujuan pembangunan milenium yang diharapkan dapat terealisasi. Masyarakat sering berpandangan bahwa sekolah yang mahal dengan menyediakan fasilitas modern adalah sekolah bermutu dan menjamin masa depan anak-anaknya. Selain tidak mampu untuk membiayai sekolah anak-anaknya, orang tua yang kurang mampu masih enggan untuk memasukkan ke sekolah bermutu.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu penghambat untuk mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada kawasan pedesaan, karena sektor dua pertiga dari rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Jika penghasilan orang tuanya

yang bekerja disektor pertanian tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka dapat dibayangkan bahwa anak-anaknya pasti tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studinya ke jenjang sekolah yang sesuai dengan usianya.

Pendidikan di Indonesia belum merata di beberapa daerah. Selain itu, fasilitas pendidikan disekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas pun sangat miskin baik infrastruktur maupun suprastruktur. Pendidikan adalah masalah krusial dalam kehidupan. Pendidikan dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia.

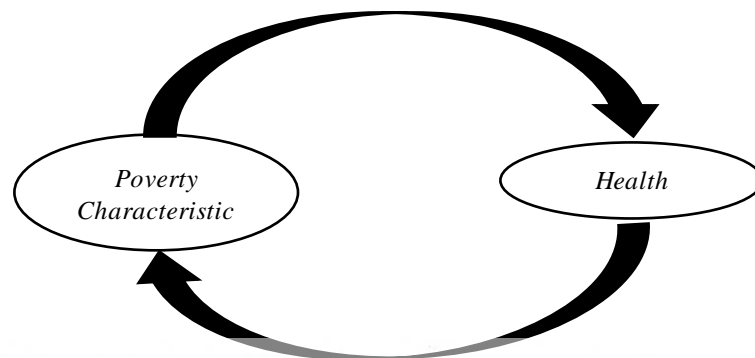
d. Kemiskinan ditinjau dari kesehatan

Salah satu penyebab tingginya kemiskinan ialah faktor struktural atau masyarakat yang tidak ingin berkembang mengubah nasib melalui pendidikan. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa pendidikan itu bukan bagian terpenting untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi dan kebijakan dalam hal pembiayaan kesehatan, tetap saja kesenjangan dan diskriminasi layanan kesehatan masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh karena kemiskinan masih terus terpelihara dengan baik di tengah kehidupan masyarakat. Miskin selalu identik dengan derajat kesehatan yang tidak baik. Kemiskinan adalah akar setiap persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang manusiawi.

Arsyad (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan keluaran energi.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara dan mutlak untuk dipenuhi. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan RI (2014), derajat kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari sektor kesehatan maupun sektor dari luar kesehatan. Sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sedangkan sektor dari luar kesehatan seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan perilaku.

Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan tidak sederhana. Kesehatan menjadi katalis untuk kemiskinan dan pada gilirannya kemiskinan dapat menciptakan kesehatan yang buruk. Kesehatan fisik dan mental yang baik sangat penting untuk produksi yang efektif, sementara strategi penghidupan produktif dan manajemen risiko adalah penting untuk menjaga kesehatan individu dan rumah tangga (Harpham, 2002).



Sumber : Harpham, 2002

Gambar 2.3 Hubungan dua arah model sederhana

Seperti halnya kemiskinan, kesehatan yang buruk mempengaruhi baik individu maupun rumah tangga, dan mungkin mempunyai dampak untuk komunitas yang lebih luas. Sebagaimana kita tahu bahwa masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan akses untuk layanan kesehatan yang baik karena masalah sarana dan prasarana (jalan yang rusak, rumah yang terpencil) serta karena masalah ekonomi. Hal tersebut adalah alasan kenapa kemiskinan dan kelaparan saling berkaitan satu sama lain. Hal-hal yang dapat pemerintah lakukan adalah menyediakan akses yang lebih baik menuju layanan kesehatan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.11 Keterkaitan Kemiskinan dan Geografi

Menurut Sach (2005) menjelaskan keadaan di mana sekelompok orang kehilangan akses untuk menggunakan sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya ekonomi, politik maupun kebudayaan. Sach mengungkapkan bahwa negara-negara yang berada di area iklim tropis cenderung lebih mudah terserang penyakit tropis seperti yang paling parah malaria. Penyakit-penyakit tropis menyebabkan

fokus negara sebagian besar mengacu pada masalah kesehatan dan kemudian penyakit-penyakit itu sendiri menyebabkan produktivitas dari negara iklim tropis rendah.

Sach (2005) mengemukakan enam penuntasan kemiskinan, yaitu:

1. Kapital manusia (*human capital*) terutama dalam kesehatan, gizi, dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Kapital bisnis (*business capital*), sarana-sarana yang diperlukan di dalam transportasi untuk pertanian, industri dan servis.
3. Infra-struktur: jalan, tenaga listrik, air minum, sanitasi, dsb.
4. Kapital alamiah (*natural capital*) berupa tanah pertanian, biodiversitas.
5. Kapital lembaga-lembaga publik seperti hukum dagang, hukum peradilan, pelayanan pemerintah.
6. Kapital ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) berupa *know how* ilmu dan teknologi yang meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan *natural capital*.

Sach menjelaskan bahwa kemiskinan adalah keadaan terakhir, bukan keadaan mula-mula dari suatu paradigma ekonomi yang menghancurkan sistem ekologi dan sosial yang berguna untuk menjaga kehidupan, kesehatan dan keberlanjutan planet bumi dan manusia. Jeffrey mengungkapkan bahwa kerentanan rumah tangga adalah akibat ketidakmampuan menabung, membayar pajak, dan memenuhi kebutuhan dasar akibatnya masyarakat terjebak dalam suatu lingkungan yang membuat mereka tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

2.12 Keterkaitan Kemiskinan dengan Pendidikan

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu dan keterampilan (Tilak, 2002). Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu problem utama dalam pembangunan negara yang dimana para penduduk miskin lebih bergantung pada pemerintah.

Kemiskinan pendapatan rumah tangga tidak memungkinkan untuk mencukupi investasi dalam pendidikan. Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Program-program yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak.

World Bank (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki kaitan erat dengan pendidikan yang tidak memadai. Pencapaian jenjang tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkaitan dengan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi. Koefisien korelasi parsial pada umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah di pedesaan, baik bagi kepala rumah tangga maupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di daerah perkotaan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tinggal di daerah pedesaan untuk setiap tambahan tahun pendidikan.

Pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Keadilan dalam memperoleh pendidikan harus diperjuangkan dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

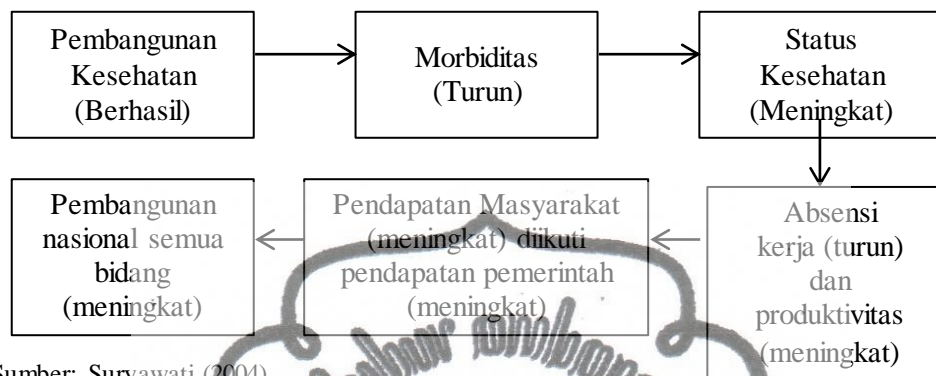
Pendidikan non formal perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Pendidikan informal dalam rangka pendidikan sosial dengan sasaran orang miskin selaku kepala keluarga (individu) dan anggota masyarakat tidak lepas dari konsep *learning society adult education experience* yang berupa pendidikan luar sekolah, kursus keterampilan, penyuluhan, pendidikan dan latihan, penataran atau bimbingan, dan latihan.

Di bidang pendidikan, salah satu kunci adalah tingginya angka putus sekolah di masyarakat miskin pada saat mereka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Masalah utama adalah kurangnya akses masyarakat miskin untuk melanjutkan dari SMP ataupun SMK, baik bersifat fisik maupun finansial (UU No. 20 Tahun 2003). Akses finansial terbatas akibat tingginya biaya menciptakan halangan bagi pendidikan masyarakat miskin pada tingkat pendidikan menengah pertama.

Menurut Todaro (2013) menjelaskan bahwa struktur pendidikan yang berlaku pada suatu daerah dapat mempengaruhi karakter sosial dan ekonomi masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Menurut Jundi (2014) menjelaskan semakin tinggi pendidikan yang dimiliki maka semakin besar kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan terhindar dari kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan suatu individu, maka keahlian serta pengetahuan juga meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas individu. Sanz *et al.* (2017) berpendapat bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh pendidikan, keterbatasan. Pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

2.13 Keterkaitan Kemiskinan dan Kesehatan

Keterkaitan yang kuat antara kesehatan dengan kemiskinan (Harpham, 2002; Strauss & Thomas, 1998). Kemiskinan dan kesehatan pada dasarnya saling berhubungan, yaitu hubungan yang tidak pernah putus terkecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinan (Richard, *et al.* 2012). Kemiskinan mempengaruhi kesehatan, sehingga orang miskin rentan terhadap berbagai penyakit, karena mereka mengalami gangguan seperti menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman yang buruk, serta biaya kesehatan tidak tersedia. Masyarakat yang sehat menekan kemiskinan karena orang sehat memiliki kondisi seperti: produktivitas kerja tinggi, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju.



Sumber: Suryawati (2004)

Gambar tersebut memaparkan bahwa apabila pembangunan kesehatan berhasil, maka status kesehatan akan mengalami peningkatan, yang dicerminkan menurunnya angka morbiditas, dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas. Seiring peningkatan produktivitas maka berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti pula pendapatan pemerintah.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan. Menurut Arsyad (1999) bahwa sebuah intervensi yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kesehatan adalah suatu cara kebijakan yang dapat mengurangi kemiskinan. Perbaikan kesehatan dapat meningkatkan daya kerja, berkurangnya hari tidak bekerja dan dapat menaikkan keluaran energi karena kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan keluaran energi. Menurut Topuz (2009) bantuan kesehatan dari pemerintah seperti asuransi dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Bakhtiari & Meisami (2010) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan di bidang kesehatan akan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan cukup penting dalam mengentaskan kemiskinan (Arsyad, 2010).

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Semakin tinggi angka kesehatan di suatu wilayah maka berindikasi pembangunan sosial ekonomi terkait fasilitas kesehatan di wilayah semakin maju. Semakin majunya pembangunan di bidang kesehatan maka menunjukkan tingkat kesehatan yang ada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan artinya meningkatnya nilai kesehatan maka produktivitas pun meningkat, sehingga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dimana nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan keluaran energi.

Menurut Todaro (2013) menyatakan bahwa salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan formal. Semakin baik akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, semakin besar pula kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mariyanti & Mahfudz (2016) memperoleh hasil yang juga sama, yaitu tingkat kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kesehatan individu menentukan produktivitas sehingga semakin

rendah tingkat kesehatan, semakin besar kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan.

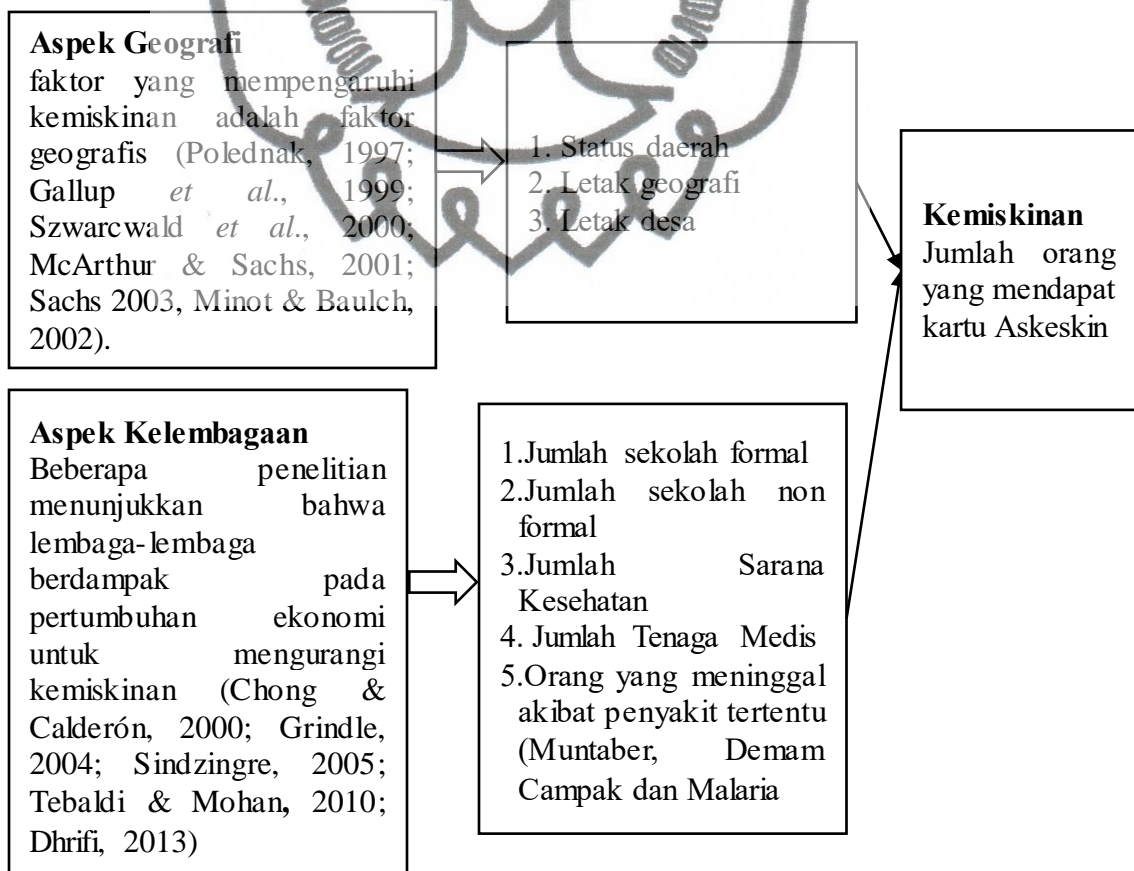
2.14 Kerangka Penelitian

Kelembagaan dalam penelitian ini adalah lembaga yang berorientasi pada pendidikan, tempat belajar dan mengajar, dimana anggotanya bisa belajar. Sementara itu Lembaga pendidikan adalah lembaga berorientasi pada pelayanan kesehatan seperti jumlah sarana kesehatan dan tujuannya untuk menjadikan seluruh masyarakat bisa selalu sehat secara mental maupun fisik

Teori Acemoglu & Robinson (2012) berpendapat bahwa kemiskinan di pengaruhi faktor geografis, kebudayaan, ketidaktahuan dan kelembagaan. Faktor geografis menyatakan bahwa penyebab kesenjangan adalah kondisi geografis, antara lain iklim tropis menyebabkan penduduknya malas, penguasanya zalim, dan merupakan sarang penyakit sehingga produktivitas rendah, atau mempengaruhi keanekaragaman spesies tumbuhan dan hewan yang dapat mendorong kemajuan.

Faktor ketidaktahuan mendasarkan pada kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara-negara. Para pemimpin lebih mementingkan dirinya dan keberlanjutan kekuasaannya namun tidak ada kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Faktor kelembagaan menekankan pentingnya peranan dari institusi dimana level dari kesejahteraan suatu negara di dunia ditentukan oleh institusi ekonomi negara.

Faktor yang dapat ditinjau dari penelitian ini berdasar konsep di atas dibedakan menjadi dua yaitu faktor geografis dan faktor kelembagaan. Faktor geografis Provinsi Riau terdiri dari status daerah, letak geografi dan letak desa. Faktor kelembagaan terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah. Pendidikan yang baik di dalam masyarakat akan menciptakan hal yang bermartabat sehingga mendorong daerahnya untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan penting untuk menurunkan kemiskinan. Kemiskinan akan menyudutkan seseorang atau masyarakat ke lingkungan hidup yang buruk dan pengetahuan tentang kesehatan yang rendah.



Gambar 2.4 Kerangka Penelitian
commit to user

2.15 Pengembangan Hipotesis

Faktor geografis dilihat dari jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh merupakan faktor penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang bermutu. Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya sarana kesehatan. Keterbatasan orang miskin untuk mengakses layanan pendidikan terutama disebabkan terbatasnya jangkauan fasilitas pendidikan, terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan, belum merata jumlah sekolah yang layak untuk proses belajar-mengajar.

Faktor kelembagaan dipandang dari tingkat pendidikan dan kesehatan kepala rumah tangga, serta akses ke pelayanan pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara nyata untuk menjadi orang miskin. Pendidikan yang tidak merata terutama di daerah terpencil memberikan peran yang cukup besar dalam menambah angka kemiskinan, pendidikan selama ini lebih mengutamakan di kota-kota besar, sehingga hanya masyarakat kota saja yang memiliki pendidikan yang cukup. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menunjang tingkat kemakmuran masyarakat dan akan dapat menekan angka kemiskinan.

Faktor yang juga menjadi penyebab kemiskinan adalah kesehatan. Kemiskinan adalah akar setiap persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang manusiawi. Kemiskinan menyebabkan sebagian rakyat tidak dapat mengakses layanan kesehatan.

Dari beberapa penjelasan teoritis dan hasil studi yang dipaparkan di atas serta beberapa pengalaman empiris, maka hipotesis dalam penelitian dibangun berdasarkan dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Dasar Teoritik 1 :Menurut Jeffry Sach.. 2003, bahwa faktor geografis mempengaruhi kemiskinan.

Hipotesis 1.1 :Terdapat pengaruh positif signifikan antara lokasi wilayah dalam kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Hipotesis 1.2 :Terdapat pengaruh positif signifikan antara letak wilayah dalam kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

2. Dasar Teoritik 2 :Menurut Daron Acemaglo Robinson.. 2012, bahwa kemiskinan antar wilayah/negara pengaruhi oleh faktor institusi/kelembagaan (*Institutional*).

Hipotesis 2.1 :Terdapat pengaruh negatif signifikan antara pendidikan dalam kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Hipotesis 2.2 :Terdapat pengaruh negatif signifikan antara kesehatan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Riau.